

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

BAB V ini, merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan. Dimana dalam BAB V peneliti akan menjabarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran-saran yang peneliti berikan baik untuk Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat dan juga untuk peneliti berikutnya.

1.1 Kesimpulan

1. Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat tidak pernah melakukan riset terkait keterbukaan informasi publik sehingga Humas tidak mendapatkan fakta-fakta yang mendukung terjadinya kelancaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat menyampaikan informasi-informasi terkait produk-produk kedewanan melalui berbagai media dan juga menyediakan pelayanan dan menerima permohonan mengenai keterbukaan informasi publik. Namun, permohonan informasi publik dari masyarakat sangat minim dan terakhir terjadi pada tahun 2018. Langkah awal dari Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat saat ada permohonan informasi adalah memeriksa formulir serta surat-surat permohonan dari masyarakat. Dalam proses nya, Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat juga melakukan koordinasi internal dengan bagian-bagian lain di sekretariat dewan. Peran humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat sebagai PPID pun tidak berjalan secara maksimal karena

minimnya permintaan sehingga Humas hanya melakukan publikasi informasi saja.

2. Perencanaan Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat terbagi menjadi perencanaan strategik dan operasional. Perencanaan strategik dalam proses Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik adalah dengan bergabung menjadi PPID pembantu dan juga dengan cara berkoordinasi mengenai dokumen-dokumen apa saja yang sifat nya terbuka dan sifat nya di kecualikan. Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat tidak melakukan rapat atau diskusi dengan KIP untuk membuat perencanaan. Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat melakukan penyebaran informasi melalui berbagai media yang ada di Jawa barat dan juga media internal seperti website resmi sehingga dalam proses nya, keterbukaan informasi publik merupakan sesuatu yang gratis dan tidak memungut biaya dari masyarakat, kecuali saat masyarakat datang langsung untuk meminta informasi fisik dan dalam hal seperti itu, Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat tidak menyediakan anggaran sehingga masyarakat harus membayar biaya cetak atau foto copy secara pribadi. Staff yang menangani keterbukaan informasi publik di Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat adalah staff umum dan fungsi Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat sebagai PPID pembantu tidak berfungsi secara maksimal.
3. Proses komunikasi yang di lakukan oleh Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik adalah

melalui proses komunikasi primer dan sekunder. Proses komunikasi primer dilakukan secara langsung yang dalam proses nya merupakan permohonan secara langsung oleh masyarakat kepada Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat. Namun, karena minim nya permohonan secara resmi maka proses komunikasi primer sering terjadi secara non formal. Dalam permohonan informasi publik juga ada tahapan dan alur yang harus diikuti dan jika masyarakat kurang puas dengan informasi yang diberikan maka masyarakat bisa mengajukan sengketa ke KIP. Keterbukaan informasi publik di Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat paling sering terjadi melalui proses komunikasi sekunder. Untuk proses komunikasi secara sekunder, Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat menggunakan berbagai macam media khusus nya *website*. Ada informasi berkala serta merta dan setiap saat yang dapat masyarakat akses di *website* DPRD. Namun, Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat hanya mengunggah informasi saja di *website* dan tidak melakukan sosialisasi yang gencar untuk masyarakat agar lebih *aware* dengan keterbukaan informasi publik. Masyarakat bisa memberikan *feedback* lewat formulir permohonan informasi publik yang ada di *website*.

4. Hambatan personal yang terjadi pada Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat terkait dengan kurang nya koordinasi antar staff. Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat juga tidak bisa mengatur kesadaran di masyarakat sehingga memiliki tantangan untuk selalu membuat narasi positif di masyarakat. Untuk hambatan dari masyarakat, terkadang masyarakat tidak

memahami batas kewenangan Humas. Hambatan semantk yang dialami Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat adalah hambatan dalam menafsirkan makna dari suatu hal sehingga terkadang terjadi *miss communication*. Untuk hambatan teknis, banyak informasi dan laman di *website* DPRD yang sudah tidak bisa di akses. Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat tidak bisa bertindak dalam mengatasi hambatan sebelum turun perintah dari atasan dan memilih untuk mengikuti alur yang sudah ada.

5. Evaluasi di Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat akan dilakukan saat terjadi masalah dan target tidak terpenuhi. Namun, karena minimnya permohonan secara langsung maka tidak ada masalah signifikan yang terjadi dan tidak ada *feedback* dari masyarakat terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pihak Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat juga tidak memaksakan masyarakat untuk meminta informasi kepada Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat. Selain itu, karena Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat tidak pernah melakukan riset, maka hasil evaluasinya tidak berjalan dengan baik karena tidak ada fakta-fakta yang mendukung keberhasilan Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat Jawa Barat. Ada kegiatan evaluasi rutin dari pihak eksternal seperti monitoring dan evaluasi yang di adakan oleh KIP dan evaluasi tahunan oleh PPID utama. Namun, hasil evaluasi Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat untuk monitoring dan evaluasi KIP nihil karena tidak ada permintaan informasi. KIP sendiri memberikan nilai cukup informatif untuk Humas dan

protokol sekretariat DPRD Jawa Barat. Untuk kegiatan evaluasi di PPID utama terjadi pada akhir tahun dan sifat nya hanya “*sharing*” saja. Tindakan lanjut dari pihak Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat dalam menanggapi hasil-hasil evaluasi adalah dengan cara menunggu perintah lebih lanjut, melakukan disposisi dan juga melakukan koordinasi antar staff.

6. Proses Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat dalam meningkatkan informasi publik belum mampu meningkatkan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat Jawa Barat. Dalam identifikasi masalah, belum dilaksanakan riset mendalam terkait keterbukaan informasi publik sehingga tidak di dukung oleh fakta-fakta mengenai keterbukaan informasi publik. Tidak ada permintaan informasi publik dari masyarakat sejak tahun 2018 sehingga membuat PPID yang ada di Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat belum berjalan dengan baik. Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat mengatasi kurangnya minat masyarakat dalam permintaan informasi publik dengan cara mempublikasikan seluruh informasi melalui media. Kegiatan evaluasi di Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat dalam keterbukaan informasi publik tidak disertai adanya riset yang membuat kegiatan evaluasi tidak dapat berjalan dengan baik.

1.2 Saran

Setelah melakukan proses penelitian, peneliti dapat memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat, Yaitu:

1.2.1 Saran Bagi Humas dan Protokol sekretariat DPRD Jawa Barat

1. Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat dapat mempertimbangkan untuk membuat riset terkait keterbukaan informasi publik untuk memiliki fakta-fakta yang terjadi di masyarakat dan juga memahami kebutuhan masyarakat sehingga proses meningkatkan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat bisa berjalan lebih baik lagi.
2. Sebaiknya Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat menambah agenda untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan keterbukaan informasi publik sehingga permohonan informasi publik bisa meningkat dan *feedback* dari masyarakat pun dapat bertambah. Salah satu cara yang dapat dipertimbangkan adalah dengan membuat *highlight* di instagram sehingga dapat menjadi sorotan untuk di baca oleh masyarakat
3. Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan media-media *sharing platform* yang sedang digandrungi oleh masyarakat, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi.
4. Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat juga dapat mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan pada *website* sehingga laman-laman tidak bisa dibuka dan belum di *update* bisa di perbaharui dan untuk informasi yang dianggap sudah tidak relevan atau sudah di rubah pun bisa dihapuskan saja daripada ada di website namun tidak bisa di akses.

5. Untuk kata-kata yang ada di laman yang tidak bisa di buka, sebaiknya di perbaiki dari “halaman yang anda harapkan kaga ada” menjadi “halaman yang anda harapkan tidak tersedia”
6. Humas dan protokol sekretariat DPRD Jawa Barat dapat mempertibangkan untuk melakukan FGD atau diskusi terkait keterbukaan informasi publik dengan KIP sehingga akan muncul solusi-solusi dan perencanaan yang mungkin bisa meningkatkan proses keterbukaan informasi publik.

1.2.2 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

Ada pun saran-saran untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk membaca dan mencari referensi mengenai hal yang akan di teliti sehingga banyak pengetahuan baru yang bisa diperoleh.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan penelitian baik fisik dan mental.
3. Peneliti selanjutnya hendaknya melakukan obsevasi dengan teliti dan juga gencar dalam mencari jawaban dari informan.
4. Untuk peneliti selanjutnya, jaga selalu kesehatan fisik dan mental karena kesehatan dapat mempengaruhi proses pembuatan skripsi penelitian.
5. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi kenyamanan dalam mengerjakan skripsi, maka disarankan untuk mencari tempat yang tenang dan nyaman untuk menyusun penelitian sesuai preferensi masing-masing.

